

## **PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM KOMUNIKASI BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Oleh

Kariaman Sinaga, S. Sos, M.AP

Dosen Fakultas Sospol Universitas Dharmawangsa Medan

### **ABSTRAK**

Dalam pengembangan destinasi wisata suatu daerah sangat diperlukan adanya implementasi kebijakan yang dapat menselaraskan antara program pembangunan secara nasional dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator penting untuk mengikutsertakan swasta dan masyarakat agar pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Menghadapi persaingan global saat ini, pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal memiliki peluang besar karena kecenderungan negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan rohani setelah terpenuhinya kebutuhan materi. Namun dalam pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas atau perwujudan dari nasionalisme. Untuk keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal perlu didukung oleh kebijakan publik, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya. Dalam penerapan kebijakan publik menuntut adanya aspek kemauan politik, aspek keadilan, dan aspek koordinasi. Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal sejalan dengan konsep pengembangan wilayah yang memerlukan pemahaman tentang kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi budaya dan komunikasi masyarakat yang berbeda antar wilayah, sehingga penetapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan pada suatu wilayah.

**Kata Kunci:** *Pariwisata, Komunikasi, Budaya Lokal*

## A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata yang dilakukan secara nasional maupun daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, swasta, dan masyarakatnya untuk memahami dan memaknai potensi budaya yang ada di daerahnya. Pemahaman terhadap budaya merupakan kunci keberhasilan pengembangan destinasi wisata dalam persaingan global (Hana Panggabean et al.2014:13).Hal ini sejalan semangat pembangunan nasional di berbagai sektor yang berhubungan dengan nasionalisme.

Aktivitas kepariwisataan yang berbasis budaya menjadi peluang untuk memperkuat budaya yang merupakan kekayaan nasional sekaligus menjadi nilai jual yang dimiliki suatu masyarakat untuk dapat bersaing dalam bidang pariwisata.Hal ini juga merupakan strategi untuk menghindari dampak negatif dari kegiatan pariwisata itu sendiri karena dalam pengembangannya tetap memperhatikan nilai-nilai budaya.

Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal menjadi salah satu bagian penting untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.Budaya lokal merupakan bagian dari inti aktivitas pariwisata yang merupakan keinginan setiap wisatawan yaitu: *to see, to learn, to taste, and to experience of something* di suatu destinasi.Wisatawan memiliki keinginan untuk belajar tentang adat istiadat dan kebiasaan lokal serta mengalami berbagai kegiatan budaya yang akan menjadi pengalaman pribadinya.

Keberhasilan Provinsi Bali dalam mengelola destinasi wisata merupakan kesuksesan dari pemerintah, swasta dan masyarakatnya untuk menjaga dan memajukan nilai-nilai budaya.Melalui pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya lokal akan diperoleh keuntungan ganda yaitu selain mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya juga mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan budaya yang ada pada masyarakatnya.

Sebagai suatu peluang, bahwa negara-negara yang telah maju perekonomiannya ditandai dengan terpenuhinya akan kebutuhan barang-barang mewah akan beralih kepada kebutuhan yang bersifat rohani seperti keinginan untuk mencari pengalaman atau pengetahuan baru tentang budaya masyarakat lain (H.Oka, 1982: 91-92).Dengan demikian memajukan destinasi wisata budaya

mejadi peluang besar untuk memanfaatkan tingkat kebutuhan masyarakat pada negara-negara maju untuk mendapatkan peningkatan pendapatan daerah dan masyarakatnya.

Peluang dari negara-negara maju harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan devisa dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk memaksimalkannya maka dilakukan kebijakan ditingkat nasional maupun di tingkat daerah atau kebijakan yang bersifat top down maupun kebijakan yang bersifat bottom up. Hal ini untuk menjawab tantangan implementasi yang ternyata lebih berat dibandingkan pada tahap pengambilan keputusan atau secara politis. Hal ini berdasarkan pada pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pariwisata yang hingga saat ini yang secara umum belum menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat tetapi lebih mensejahterakan sebagian masyarakat saja.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, pengembangan destinasi pariwisata mengalami dilema antara tuntutan secara nasional dengan tuntutan secara internasional. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan berupa regulasi yang dapat menjaga budaya lokal agar tetap menjadi acuan atau pedoman dalam proses pengembangan destinasi wisata. Tanpa adanya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pedoman dalam pengembangan maka pengembangan yang dilakukan tidak memiliki karakter dan lemah dalam keberlanjutannya.

Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda antar wilayah, sehingga penetapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan pada wilayah yang bersangkutan. (Andri, 2006).

Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya (Mulyana, 2003:4). Apa yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakannya, apa yang kita lihat, perhatikan, atau abaikan, bagaimana kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh budaya. Pada gilirannya, apa

yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakan, apa yang kita lihat turut membentuk, menentukan, dan menghidupkan budaya kita.

## **B.PEMBAHASAN**

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan wisata berbasis budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata meliputi:kebijakan publik, SDM, partisipasi masyarakat, komunikasi dan pelestarian budaya.

### **1.Kebijakan Publik**

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah menjadikan wilayah atau suatu negara berada dalam persaingan global yang menuntut kesiapan atau daya tahan yang tinggi untuk dapat menghadapi persaingan.Maka sangat diperlukan strategi pengembangan budaya yang sejalan dengan pengembangan destinasi pariwisata yang unik sesuai dengan keinginan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.Hal ini berkaitan dengan tuntutan kemampuan dalam menetapkan kebijakan yang dapat menghadapi persaingan global tersebut.

Pengembangan destinasi wisata budaya lokal akan memperkuat rasa kebangsaan atau cinta kepada tanah air.Siagian (1994) dalam Erda Rindarsih (2015:23) menyatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).Kebijakan yang dilakukan secara lokal maupun nasional merupakan kebijakan untuk memperkuat nasionalisme.

Sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam maka indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan kekayaan budaya bangsa.Melalui kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan pemanfaatannya potensi budaya bangsa pada sebesar-besarnya kepentingan publik.Dalam penerapannya sangat diperlukan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kebijakan pengembangan destinasi wisata adalah:

a. Aspek Keadilan

Suatu kebijakan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat dengan dikeluarkannya suatu peraturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi. Hal ini diperlukan agar program yang dijalankan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat merupakan subjek dan sekaligus objek dari pengembangan destinasi pariwisata. Masyarakat akan merasa ikut bertanggungjawab atas program pengembangan destinasi wisata yang dijalankan pemerintah apabila aturan yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan harus mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar dapat diterima untuk dijalankan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata maka aturan yang akan dilaksanakan juga akan dengan mudah dipahami untuk dilaksanakan.

Dalam menegakkan asas keadilan, kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan destinasi wisata dapat dibedakan berdasarkan pada wilayah yang menjadi sasaran. Kebijakan publik bervariasi menurut wilayah yang diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, kelompok sasaran yang dituju, dan substansi perubahan yang diharapkan. (Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012:24). Dalam hal ini maka pemanfaatan potensi budaya yang ada pada suatu wilayah harus diikuti dengan aturan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.

Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antar wilayah dalam pembangunan kepariwisataan. Bagi suatu daerah yang telah maju kepariwisataannya harus diperlakukan berbeda dengan daerah yang belum maju kepariwisataannya agar tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah. Hal ini juga berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanat dari pembangunan secara nasional.

### b. Kemauan Politik (Political Will)

Suatu kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung baik pada level nasional maupun level daerah. Hal ini berkaitan dengan pilihan sektor pembangunan yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan suatu daerah yang harus melewati suatu proses politik. Pada situasi tertentu kebijakan pembangunan destinasi wisata lebih diarahkan pada bidang yang sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai regulator.

Sejalan dengan luasnya sektor pembangunan yang akan dilakukan di Indonesia maka prioritas terhadap pembangunan pariwisata baik yang dilakukan secara nasional maupun daerah merupakan sektor yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena pembangunan pariwisata memiliki *multiplier effect* yang sangat tinggi sehingga akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

### c. Koordinasi

Salah satu aspek krusial yang paling mempengaruhi tumbuh kembang industri pariwisata adalah masalah peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pariwisata. Peraturan dan perundang-undangan pariwisata mencakup aspek yang sangat luas dan bersifat lintas sektor antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, seperti: a) aturan mengenai keimigrasian yang terkait dengan paspor dan visa yang merupakan domain kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) aturan mengenai *international aviation agreements* yang merupakan domain Kementerian Perhubungan dll. (Judisseno, 2017:96).

Kordinasi yang dilakukan antar kementerian juga mencakup pengembangan destinasi wisata budaya yang akan menjadi daya tarik kunjungan wisata. Kunjungan wisatawan asing masih dominan pada Bali sebagai tujuan wisata menunjukkan kualitas kordinasi baik secara nasional dan daerah dapat dikatakan masih rendah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata, pembangunan daerah bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional. Pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan *spirit* yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang

dimiliki. Itulah sebabnya pembangunan daerah seyogyanya dilihat sebagai sub-sistem pembangunan nasional. Jadi bukan sekedar serpihan dari sistem pembangunan nasional. Sebagai suatu sub-sistem, pembangunan daerah memiliki kebulatan tersendiri, yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional. (Usman, Sunyoto, 2010:13).

Kegagalan menempatkan pembangunan daerah sebagai subsistem dari keseluruhan sistem pembangunan nasional, bukan hanya mempersulit untuk memperoleh hasil yang optimal, melainkan juga dapat merusak proses pembangunan nasional. Dengan demikian, perencanaan dan implementasi pembangunan daerah cukup kompleks, mengingat di samping kebutuhan mengakomodasi kepentingan-kepentingan nasional yang berada di daerah, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah.

Maka dalam pengembangan destinasi wisata sebagai bagian dari program pembangunan nasional dapat dikoordinasikan agar program yang dijalankan dapat memenuhi aspirasi dari masyarakat. Koordinasi juga sangat diperlukan dengan instansi lainnya untuk menghindari adanya duplikasi program, imitasi rencana, dan dapat saling tular dalam keunggulan atau strategi pembangunan pada berbagai instansi.

## 2. Sumber Daya Manusia.

Meskipun dalam proses penetapan kebijakan telah melalui proses yang mengikutsertakan masyarakat atau kebijakan yang membangun sinergitas namun tetap saja program pengembangan destinasi wisata suatu wilayah sangat ditentukan oleh sumber daya manusia baik sebagai aparatur pemerintah dan juga masyarakatnya. Sejalan dengan konsep pengembangan wilayah bahwa pembangunan suatu wilayah merupakan sesuatu yang kompleks sehingga keberhasilannya didukung oleh banyak pihak.

Pengembangan destinasi wisata perlu didukung oleh sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap wisatawan, Pelayanan yang dimaksud termasuk layanan birokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah (Kang Lin Peng: 2016). Pergeseran dari industri agraris kepada kewirausahaan harus

didukung oleh sumber daya manusia dengan pendekatan interdisipliner untuk mempelajari dan mengembangkan sistem pelayanan menuju yang lebih baik.

Pengembangan destinasi wisata berpusat pada manusia (people centered development) untuk peningkatan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang menekankan pada pembelajaran dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin di capai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Dalam hal ini, Moelyarto (1999) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat meliputi:

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik.
4. Budaya kelembagaannya ditandai dengan adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat dan pemerintah lokal yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Program pembangunan pariwisata yang baik harus mengikutsertakan beberapa elemen berikut: konservasi atas biodiversiti berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat lokal, memberikan intepretasi dan menambah pengalaman, mendorong melakukan aksi positif, mendorong berkembangnya industri kecil, konservasi sumberdaya tidak terbarukan, memfokuskan pada partisipasi lokal dan kesempatan berusaha pada masyarakat pedesaan. (Wood, 2002, dalam Erda Rindarsih 2015:23).



Masyarakat merupakan tuan rumah (host) yang akan menghadapi wisatawan, sehingga masyarakat harus memiliki kesiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Hal ini akan memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung untuk melihat budaya masyarakat. Selanjutnya sinergitas antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat menentukan dalam memajukan atraksi budaya yang menjadi salah satu ketertarikan seseorang untuk mengunjungi suatu destinasi wisata.

Nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat merupakan aset atau potensi kebijakan yang dapat diadopsi dalam pengembangan alternatif dan rekomendasi kebijakan. Untuk dapat memasukkan nilai-nilai budaya lokal yang mulia maka pemerintah harus mengembangkan sikap demokratis dan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian demokratisasi dan partisipasi akan dikembangkan dengan amat luas dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata.

Partisipasi merupakan komponen dasar dari pemerintahan yang demokratis sehingga dalam menghasikan kebijakan harus memberikan kesempatan yang luas kepada warganya. Partisipasi dapat diperoleh melalui diskusi, pembelajaran, atau negosiasi dan kerjasama agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif ( Benedetto Grazella all.et.,2016: 38-48).

Partisipasi dimulai dari perencanaan pembangunan wilayah yang merupakan upaya terorganisir untuk menetapkan sasaran pembangunan ekonomi wilayah, mengumpulkan dan menganalisis informasi, membangkitkan dan mengevaluasi berbagai aktivitas dalam kerangka pembangunan wilayah yang strategis (Sirojuzilam: 2008). Dalam hal ini perencanaan pemanfaatan sumber daya publik yang benar-benar seksama baik sektor swasta petani, pengusaha kecil, organisasi volunter, koperasi dan perusahaan besar harus turut ambil bagian dalam proses perencanaan.

#### 4. Pelestarian Budaya

Budaya merupakan potensi yang sangat tinggi nilainya bagi suatu bangsa karena identitas suatu bangsa merupakan acuan dari pembangunan yang dijalankan oleh suatu negara. Kebijakan yang berkaitan dengan perundang-undangan dalam pengembangan destinasi wisata harus berdampingan dengan nilai-nilai- budaya yang ada di masyarakat.

Untuk membangun destinasi wisata sangat diperlukan keselarasan dengan budaya masyarakat lokal, karena melalui keselarasan tersebut maka program pengembangan destinasi wisata akan berjalan secara berkelanjutan. Budaya masyarakat yang dimaksud mencakup pemberdayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, kesenian, adat istiadat, yang menuntut adanya penguatan melalui peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan.

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi semata-mata namun tetap memperhatikan kelestarian budaya sesuai dengan idiologi bangsa. Menurut Amartya Sen dalam Warjio Ph.D (2016:66) menyatakan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai kebebasan. Menurut Sen dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan sempit pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial.

Sejalan dengan pelestarian budaya diatur dalam PP No.43 tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan dengan: 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swwakelola oleh desa, 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Pembangunan Desa, 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

## 5. Komunikasi Budaya

Di dalam buku “ Intercultural Communication: A Reader ” dinyatakan bahwa komunikasi antar budaya (intercultural communication) terjadi apabila sebuah pesan (message) yang harus dimengerti dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu untuk konsumsi anggota dari budaya yang lain (Samovar, Porter, 1994:19). Selain itu, terdapat pula definisi lain menurut Liliweri yang menyatakan bahwa proses komunikasi antar budaya merupakan interaksi antarpribadi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda (Liliweri:2003:13). Tujuan dari komunikasi antar budaya, antara lain :

1. Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi.
2. Memperluas komunikasi antarorang yang berbeda budaya.
3. Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi.
4. Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya.
5. Meningkatkan ketrampilan verbal dan non verbal dalam komunikasi.
6. Menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif

Budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu. Sebagaimana kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda maka dengan sendirinya akan mempengaruhi cara dan praktek berkomunikasi kita, banyak aspek/ unsur dari budaya yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi seseorang. Pengaruh tersebut muncul melalui suatu proses persepsi dan pemakna suatu realitas.

Dalam sebuah kebudayaan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dimana sebuah kebudayaan pasti menggambarkan identitas/ciri dari sebuah tempat/pemilik kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu ke ranah yang lebih luas. Banyak kebudayaan yang

tidak dikenal atau tidak di ketahui oleh masyarakat luas di karenakan kurangnya pengenalan atau komunikasi terhadap daerah luar, yang menyebabkan sebuah kebudayaan tidak kenal. Hal ini banyak menyebabkan sebuah kebudayaan cepat hilang/punah yang tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Jadi hubungan antara kebudayaan dan komunikasi sudah sangat jelas terlihat, di dalam sebuah kebudayaan pun juga terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan, dan komunikasi itu sendiri membantu mengenalkan kebudayaan itu ke ranah yang lebih luas untuk dikenal masyarakat luas.

### **C.KESIMPULAN**

- 1.Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal harus didukung oleh kebijakan yang lahir dari hasil kesepakatan antara pemerintah, swasta (pengusaha), dan masyarakat.
- 2.Kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, menjalin koordinasi antar instansi, dan menunjukkan kemauan yang kuat untuk memajukan wisata berbasis budaya lokal.
- 3.Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat berinovasi sesuai dengan pergeseran dari kehidupan pertanian agraris menuju pada pelayanan pariwisata yang memiliki dampak yang kluas terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 4.Pengembangan destinasi wisata sesuai dengan pengembangan suatu wilayah yang merupakan bagian dari perencanaan wilayah untuk memanfaatkan suatu wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Komunikasi membantu mengenalkan kebudayaan ke ranah yang lebih luas untuk dikenal masyarakat luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andri, 2006, Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan, Jurnal Inovasi, Vol 6 (18)
- Agus, Et.al.2012.Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Bonedetto Grazella all.et,2015.Procedia Environmental Sciences, Elsevier Bv,Ecosmart, [Http:// creativecommos.org./licences](http://creativecommons.org/licenses).Vol.28.No.6.2016 pp.125-1244
- Damanik,Janianton,Et.all.2015.Membangun Pariwisata Dari Bawah,Gajah Mada University Press,Yogyakarta
- Judisseno, Rimsky K,2017.Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana,Deddy. 2003. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, cetakan kelima, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljarto.1999.Politik Pembangunan Sebuah Analisis,Konsep,Arah dan Strategi, Tiara Wacana Yogya,Yogyakarta
- Panggabean,Hana.Et.al.2014.Kearifan Lokal Keunggulan Global, Elex Media Komputindo,Jakarta
- Peng.Kang Lin.2016.Inovasi Wirausahawan Sosial Melalui Aktivisme,Jurnal Perhotelan Kontemporer, Vol.28 ISS 6 Hal.1225-1244
- Peraturan Pemerintah No.43 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Samovar, LarryA. & Edwin R Mc Daniel, Richard E. Porter. 1994. *Intercultural Communication A Reader Ninth Edition*. Belmont: Wadsworth.